



MUKOMUKO

SELASA, 24 JANUARI 2023

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Estimasi KN Rp 1,3 Miliar Penyidik Kejar Penetapan Tsk

BENGKULU - Meski ditargetkan awal Januari 2023 sudah ditetapkan tersangka pada kasus dugaan korupsi anggaran tiga paket pekerjaan jalan Kabupaten Mukomuko di Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko 2021. Penyidik khusus (pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu tak ingin kecolongan. Pasalnya penyidik memantapkan beberapa hal dalam perkara ini, sebelum adanya penetapan tersangka. "Kita perhatikan faktanya, karena ini nantinya akan berujung ke pengadilan, kita tidak ingin ada celah, malah lepas di pengadilan," ungkap Kepala Seksi Penyidikan (Kasidik) Pidsus Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH.

Kata Danag, penyidik masih berusaha keras penuhi perintah pimpinan dalam penetapan tersangka yang sebelumnya digembor-gembor pada awal Januari ini. Khususnya hasil dari kerugian negara pada perkara ini yang diestimasi penyidik sebelumnya mencapai Rp 1,3 miliar.

► **Baca ESTIMASI..Hal 7**

Sambungan dari halaman 1

"Penyidik kejar hasil perhitungan kerugian negara, serta terus menggali lagi perbuatan melawan hukum yang ada, serta mens rea," sebut Danang.

Meski sudah pada tahap pemeriksaan kepada penyedia material dan penyedia alat berat. Penyidik masih memiliki agenda memeriksa saksi lainnya dalam perkara ini. "Tidak sebatas itu, masih ada beberapa yang belum juga, kita masih terus melakukan pemeriksaan kepada pihak terkait lainnya," jelas Danang.

Diketahui, penyidik rupanya sudah mengantongi perbuatan melawan hukum dalam pekerjaan tiga paket jalan tersebut. Dan sudah melakukan pengkajian. Agar hal tersebut lebih mengerucut, penyidik juga melakukan sinkronisasi hasil dari ahli konstruksi dengan hasil dari BPKP. Dari hasil sinkronisasi tersebut, maka penyidik akan menilai terkait bagaimana pengerjaan fisik serta apa sejauh mana pihak terkait terlibat dalam pengerjaannya.

Hingga saat ini, penyidik sudah memastikan perbuatan melawan hukum dalam kasus ini pada ada kekurangan mutu dan volume

atas pengerjaan tiga paket jalan Mukomuko tersebut. Diberitakan sebelumnya, penyidik diperintahkan kebut penindakan kasus tersebut oleh Kajati Bengkulu, Dr. Heri Jerman, SH, MH pada Kamis (8/12). Kejati menegaskan saat itu, akhir Desember 2022 kasus ini harus tuntas oleh penyidik. Dari tiga paket proyek jalan ini, penyidik mendapati estimasi kerugian negara sebesar Rp 1,3 miliar.

Kasus ini naik ke penyidikan pada awal November 2022 lalu, tim penyidik telah memeriksa beberapa saksi yakni Mantan Kabid Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Muko Muko, Budiarto, mantan Kasi Jalan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Mukomuko Z. Abidin, mantan Kasi Pemeliharaan Jalan Dinas PUPR Mukomuko, Fauzi Rizal, dan Mantan Bendahara Dinas PUPR Mukomuko Agus Sunardi.

Selanjutnya dua konsultan pengawas yakni Dirut CV Pribia, Dwi Oktarina, Dirut CV. Cakra Manunggal, Itnu Bagyo serta ada beberapa saksi lain yang belum diketahui jabatan dan perannya dalam kasus ini, yakni, Saipul Amri, Miswan, Agus Sunardi, Adi Marta, Koneri, Mardi, Arfa'i, Fauzi

Maulana, dan Yoviansyah.

Tiga pekerjaan jalan yang diduga adanya penyimpangan yakni pekerjaan rekonstruksi peningkatan Jalan Kabupaten Mukomuko tahun 2021 yang sedang dalam penyidikan Pidsus Kejati Bengkulu antara lain, peningkatan Jalan Desa Lubuk Pinang, Desa Sido Makmur, Kecamatan Teramang Jaya, Jalan Anggrek Desa Arga Jaya, Kecamatan Air Rami dengan nilai kontrak Rp 5 miliar lebih yang dananya berasal dari Dana Insentif Daerah (DID) dikerjakan oleh PT. Citra Muda Nur Bersaudara.

Selanjutnya, peningkatan Jalan Desa Kota Praja, Jalan Lingkar Pasar Desa Agung Jaya, Jalan Simpang Talang Arah, Gajah Makmur Kecamatan Malin Deman dengan nilai kontrak Rp 6 miliar lebih yang sumber dananya berasal dari APBD Kabupaten Mukomuko, dan dikerjakan PT. Deki Karya Bestari.

Terakhir peningkatan Jalan Simpang Kasidi Arga Jaya Tirta Kencana Marga Bukit Harapan dengan nilai kontrak Rp 10 miliar lebih yang sumber dananya berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dikerjakan PT Pandora Energi Persada. (jam)